



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 9802-9808

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tantangan Dan Peluang Implementasi Smart Governance Dalam Pengelolaan Administrasi Publik Di Kecamatan Monano

Rara Ayudyah Oliy^{1✉}, Rizkiyanto Ibrahim²

Universitas Ichsan Gorontalo Utara

Email: raraayudyah3008@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang implementasi smart governance dalam pengelolaan administrasi publik di Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Smart governance mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Masyarakat sebagai sampel penelitian ini yang kemudian disebut sebagai informan. Untuk mendapatkan dokumen yang valid maka dilakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan smart governance di Kecamatan Monano adalah keterbatasan infrastruktur digital, terutama akses internet yang tidak merata, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi. Meskipun demikian, terdapat peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas partisipasi masyarakat melalui platform digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan peningkatan infrastruktur digital dan pelatihan SDM yang berkelanjutan, Kecamatan Monano memiliki potensi untuk mengadopsi smart governance guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : *Implementasi; Smart Governance; Pengelolaan; Administrasi Publik*

Abstract

This study analyzes the challenges and opportunities of smart governance implementation in public administration management in Monano District, North Gorontalo Regency. Smart governance uses information and communication technology (ICT) to increase efficiency, transparency, and community participation in government decision-making. This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. The community as a sample of this research is then called the informant. To obtain valid documents, observations, and interviews are carried out. The study results show that the main challenges in implementing smart governance in Monano District are the limitations of digital infrastructure, especially uneven internet access, and the low capacity of human resources (HR) in using technology. Nevertheless, there is a significant opportunity to improve the efficiency of public services and expand public participation through digital platforms. This study concludes that with the improvement of digital infrastructure and continuous human resource training, Monano District has the potential to adopt smart governance to improve governance that is more inclusive and responsive to the needs of the community.

Keyword: *Implementation; Smart Governance; Management; Public Administration;*

PENDAHULUAN

Penerapan smart governance dalam administrasi publik kini menjadi perhatian utama pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Smart governance mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. (Chen & Nugroho, 2024) Di Indonesia, konsep ini sedang diterapkan secara bertahap dalam pengelolaan administrasi publik, terutama untuk mendukung modernisasi pelayanan dan reformasi birokrasi. Kecamatan Monano di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki peluang besar untuk memanfaatkan smart governance dalam menghadapi tantangan digitalisasi di era saat ini.

Meski demikian, penerapan smart governance di kecamatan seperti Monano tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah infrastruktur digital yang belum merata, khususnya akses internet. Di wilayah pedesaan seperti Monano, akses internet sering kali terbatas, menghambat penggunaan teknologi secara optimal dalam administrasi pemerintahan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya digitalisasi dalam pelayanan publik dan komunikasi antar instansi akan sulit terwujud.

Sebagaimana penelitian yang tulis oleh Ahtu Duriat dkk yang bertajuk "*Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (E-Government) dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung*" dengan hasil penelitian hendaknya ada upaya pemerintah dalam menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Menghadapi revolusi masyarakat

5.0 di Kota Bandung yaitu Memanfaatkan sumber daya manusia aparatur dalam mengelola pemerintahan; Memberikan penugasan yang jelas kepada pegawai untuk mengelola dana E-Government; Kekuatan Kota Bandung memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sesuai bidangnya masing-masing. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai peningkatan pengetahuan tentang Smart Governance; Terdapat 350 aplikasi menghadapi revolusi masyarakat 5.0 keberadaan Bandung Command Center sebagai pusat kendali teknologi informasi Bandung Smart City yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata edukasi bagi Kota Bandung. (Duriat et al., 2022) hal yang sama juga di sampaikan oleh Riana Dwiza dkk dengan hasil penelitian bahwa, Sosialisasi yang diikuti oleh 12 peserta ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu dengan memadukan tatap muka dan teknologi digital. Peserta sangat antusias dalam menyerap materi dan aktif dalam sesi tanya jawab interaktif. Sebagai hasil dari sosialisasi, para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang aplikasi AI dalam pemerintahan cerdas. Untuk memaksimalkan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang, disarankan untuk mengembangkan materi yang lebih komprehensif, memberikan pelatihan berkelanjutan, melibatkan mitra tambahan, dan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Dengan mengambil langkah-langkah ini, inisiatif pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi para peserta dan masyarakat luas. (Dwiza et al., 2024)

Selain masalah infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan penting dalam implementasi smart governance. (Sosiawan, 2015) Banyak pegawai pemerintah di tingkat kecamatan yang belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Minimnya pelatihan dalam bidang teknologi digital menghambat proses transisi ke sistem yang lebih modern. (Darmansah et al., 2024) Di samping itu, resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi, terutama di wilayah yang masih mengandalkan sistem manual, kerap memperlambat adopsi smart governance. (Djatkiko, n.d.) Walaupun menghadapi tantangan tersebut, penerapan *smart governance* di Kecamatan Monano juga menawarkan berbagai peluang positif. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, seperti dalam pengelolaan data kependudukan, perizinan, dan pelayanan administratif lainnya. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama melalui metode manual kini dapat dipercepat melalui digitalisasi, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. (Wahyuni, 2023)

Selain itu, *smart governance* juga membuka kesempatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui platform digital, masyarakat Monano dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi, keluhan, atau usulan terkait pembangunan di daerahnya. (Kurnia & Alfirdaus, 2023) Hal ini akan memperkuat prinsip

partisipasi dalam pemerintahan, di mana masyarakat berperan aktif, bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai kontributor dalam pembangunan. (Febriyanti, 2020) Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan SDM, penerapan *smart governance* di Kecamatan Monano menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas administrasi publik di tingkat lokal. Dengan pendekatan yang tepat, kecamatan ini dapat menjadi contoh bagaimana teknologi dapat mendukung tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tantangan Dan Peluang Implementasi Smart Governance Dalam Pengelolaan Administrasi Publik yang ada di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan (Anggito & Setiawan, 2018) bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball* teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, keterangan dari wawancara, dan dokumentasi. Sumber tambahan seperti buku dan jurnal, situs web, dan sumber lainnya. Setelah semua data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data dengan memperhatikan masing-masing elemen objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di temukan bahwa, implementasi *smart governance* di Kecamatan Monano masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal infrastruktur digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan pegawai kecamatan, diketahui bahwa akses internet yang tidak merata menjadi hambatan utama dalam digitalisasi layanan publik. Beberapa desa di Kecamatan Monano masih mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet, yang berakibat pada lambatnya pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi dan komunikasi antar instansi. Infrastruktur TIK yang kurang memadai ini membuat penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik belum optimal.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi digital masih terbatas. Sebagian besar pegawai kecamatan mengakui bahwa mereka kurang mendapat pelatihan yang memadai

terkait penggunaan teknologi informasi. Beberapa program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah hanya memberikan pemahaman dasar tentang teknologi, sehingga tidak cukup untuk mendukung penerapan *smart governance* secara penuh. Resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital juga masih dirasakan, terutama di kalangan pegawai yang sudah lama bekerja dengan sistem konvensional.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Teny Cartika dkk bahwa, Penerapan konsep *Smart Governace* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dilandaskan pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis. Dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Ciamis yang telah melek teknologi menjadikan peluang untuk dapat menerapkan konsep Smart Governance, melalui beberapa kebijakan dan program pembangunan dengan mengangkat aspek-aspek yang ada pada konsep Smart City, baik dalam menciptakan layanan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dengan dapat memudahkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis. (Cartika et al., 2024)

Namun, meskipun terdapat berbagai tantangan, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat dan pemerintah Kecamatan Monano melihat peluang besar dalam penerapan smart governance. Banyak perangkat desa menyadari bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Misalnya, proses perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu dapat dipercepat melalui sistem online. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pemantauan data kependudukan dan administrasi lainnya menjadi lebih akurat dan mudah diakses.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat kecamatan juga berpotensi meningkat dengan adanya *smart governance*. Melalui platform digital yang terintegrasi, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan, usulan, atau aspirasi mereka kepada pemerintah setempat. Hal ini akan mendorong keterbukaan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun implementasi smart governance di Kecamatan Monano masih menghadapi tantangan signifikan, peluang yang ada memberikan harapan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di masa depan dengan dukungan kebijakan dan pelatihan yang tepat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan elemen penting dalam penerapan *smart governance*, karena teknologi memfasilitasi keterlibatan warga secara lebih luas dan aktif. Dengan dukungan platform digital yang terhubung, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapat, keluhan, serta saran terkait kebijakan publik secara cepat kepada pemerintah. Di Kecamatan Monano, misalnya, keterlibatan

warga melalui forum daring memungkinkan mereka untuk berkontribusi terhadap keputusan mengenai pembangunan dan pelayanan publik tanpa harus hadir secara fisik. Selain itu, teknologi juga mendukung transparansi, memungkinkan warga untuk memantau proses keputusan yang diambil oleh pemerintah. Partisipasi seperti ini memperkuat prinsip tata kelola yang inklusif dan responsif, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

SIMPULAN

Implementasi *smart governance* di Kecamatan Monano menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur digital dan keterbatasan sumber daya manusia. Akses internet yang tidak merata serta minimnya pelatihan teknologi bagi pegawai kecamatan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penerapan teknologi dalam administrasi publik. Meskipun demikian, terdapat peluang besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui adopsi *smart governance*. Digitalisasi dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan pelatihan yang berkelanjutan, Kecamatan Monano memiliki potensi untuk memanfaatkan teknologi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Cartika, T., Yuliani, D., & Taufiq, H. O. H. (2024). Pelaksanaan Smart Governance di Kabupaten Ciamis. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(2), 183–194.
- Chen, K., & Nugroho, H. W. (2024). Blueprint Enterprise Architecture Sistem Informasi Pelayanan Warga Disabilitas Era Smart Governance Menggunakan The Open Group Architecture Framework (Togaf) Di Disdukcapil. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(8).
- Darmansah, T., Nur, A. M., Suryadi, H. S., & Nurarfiansyah, L. T. (2024). Tantangan dan solusi dalam pengelolaan arsip di era digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 16–20.
- Djatmiko, R. M. G. H. (n.d.). *Transformasi Kebijakan Administrasi Publik Menuju Era Society 5.0*. Penerbit Adab.
- Duriat, A., Arifin, R. K., & Arifin, H. B. (2022). Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (E-Government) dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung. *Professional:*

- Dwiza, R., Agus, S., Zico Pratama, P., Hilman Ferdinandus, P., & Faruq Aziz. (2024). Sosialisasi Artificial Intelligence Menuju Smart Government Untuk Kelompok Pkk Rw 06 Tegal Parang Mampang. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 41–46. <https://doi.org/10.34148/komatika.v3i2.633>
- Febriyanti, R. (2020). *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat*. Lekkas.
- Kurnia, R. A., & Alfirdaus, L. K. (2023). Implementasi Smart City Di Kota Bandung Dalam Mewujudkan Konsep Smart Governance. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 329–348.
- Sosiawan, E. A. (2015). Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, 1(5).
- Wahyuni, N. (2023). Inovasi Digital Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kota Padang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 646–668.